



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TERBUKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KARTONO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT KEGIATAN PENDUKUNG KEGIATAN
PUSAT PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
3. NHK : **854446**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	237.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	501.969.821
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.488.969.821
III. HUTANG	Rp.	338.753.967
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.150.215.854

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.